LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
BALE BANDUNG KELAS 1A

SEMESTER I TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud Dan Tujuan 2
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Rencana Kerja 3
BAB II 5
METODOLOGI 5
2.1. Metode Penelitian 5
2.2. Populasi Dan Sampel 5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 6
2.5. Teknik Analisis Data 6
2.6. Tahapan pelaksanaan 7
BAB III 9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 9
3.1. Profilresponden 9
3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator 12
3.3. Indeks Persepsi KorupsiSatuan Kerja pada pengadilan 21
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayananSatuan Kerja pada pengadilan 22
BAB IV 23
PENUTUP 23
4.1. Kesimpulan 23
4.2. Rekomendasi 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untukmenjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan LaporanHasilPelaksanaanSurveiPersepsiKorupsipadapengadilaniniadalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan LaporanHasilPelaksanaanSurveiPersepsiKorupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. RencanaKerja

1.4.1. Persiapan

Sebelummelaksanakansurveipersepsikorupsibeberapapersiapan yang perluperhatikanadalahsebagaiberikut.

- PenetapanPelaksana DilaksanakanSendiri, surveidapatdilaksanakansecaramandiriolehpenyelenggarapelayanandengan SDM yang dimilikinya
- PenyiapanBahan
  a. Kuesioner.
  b. BagiandariKuesioner/Pengantar
  c. Kelengkapanperalatan.
- PenetapanResponden, LokasidanWaktuPengumpulan Data
  a. JumlahResponden.
  b. LokasidanWaktuPengumpulan Data.
- PenyusunanJadwal Penyusunanrencanadanpelaksanaansurveidilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- PengisianKuesionerolehrespondenyang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu daripetugasdanhasilnyadikumpulkan ditempat yang

telahdisediakan.

- Pengujiankualitasdanvaliditas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Surveidilaksanakandalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalamsatutahun).

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. LokasiPenelitianDan Unit Analisis

Lokasipenelitianadalahtempatdimanapenelitimelakukanpenelitianterutamadalammenangkapkejadianatauperistiwa yang sebenarnyaterjadidariobyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalamhaliniyaitu Kantor PengadilanNegeri/Tinggi.

Unitanalisisadalahsesuatu yang berkaitandenganfokusmasalah yang ditelitidalamhaliniadalah proses pemberianlayanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disitanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satubulanatau data minimal 150 responden.Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasidengan responden, membagikandanmengumpulkankuesioner, meneliti kuesioner, sertasekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurveisecaratepat oleh petugas,danbertanggungjawabterhadaphasilperhitungansurveiIPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif.Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. ***Kedua***, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel1

Model alurpenyusunansurvei IPK menujuZonaIntegritas

Tabel2

RuanglingkupsurveiIndeksPresepsiKorupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel3

NilaiPersepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profilresponden

3.1.1. Tingkat pendidikanresponden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, 56% pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bale Bandung mayoritas memiliki latar belakangpendidikan SLTA.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	TidakSekolah	0	0%
2	SD	1	0.66666666666667%
3	SMP/SLTP	20	13.333333333333%
4	SLTA	84	56%
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	12	8%
6	Sarjana (S1)	33	22%
7	PascaSarjana (S2/S3)	0	0%
		150	**100%**

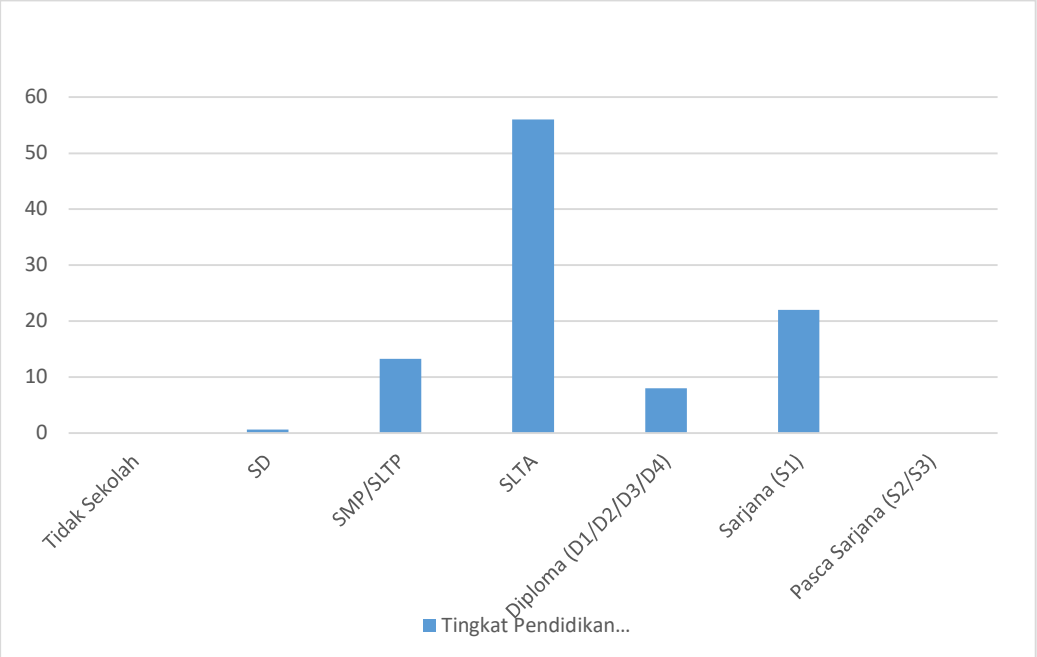

3.1.2. Pekerjaanresponden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 26,66% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bale Bandung mememiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	15	10%
2	TNI/POLRI	4	2.6666666666667%
3	PegawaiSwasta	30	20%
4	Wiraswasta	40	26.666666666667%
5	Petani/Nelayan	2	1.3333333333333%
6	Pedagang	8	5.3333333333333%
7	Pelajar / Mahasiswa	24	16%
8	Lainnya	26	17,33333333333333%
		150	**100%**

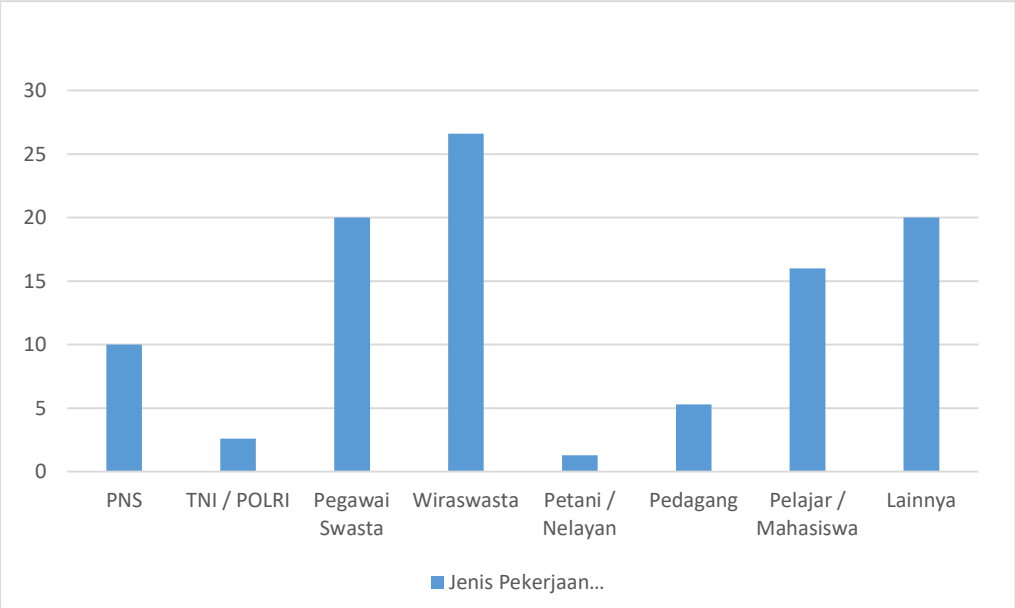

3.1.3. Kelompok usiaresponden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun dengan jumlah 66 orang (44 %) dari total 150 orang.

Tabel 6.

Usia responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	66	44%
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	37	24.666666666667%
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	24	16%
4	Diatas 50 Tahun	23	15.333333333333%
		150	**100%**

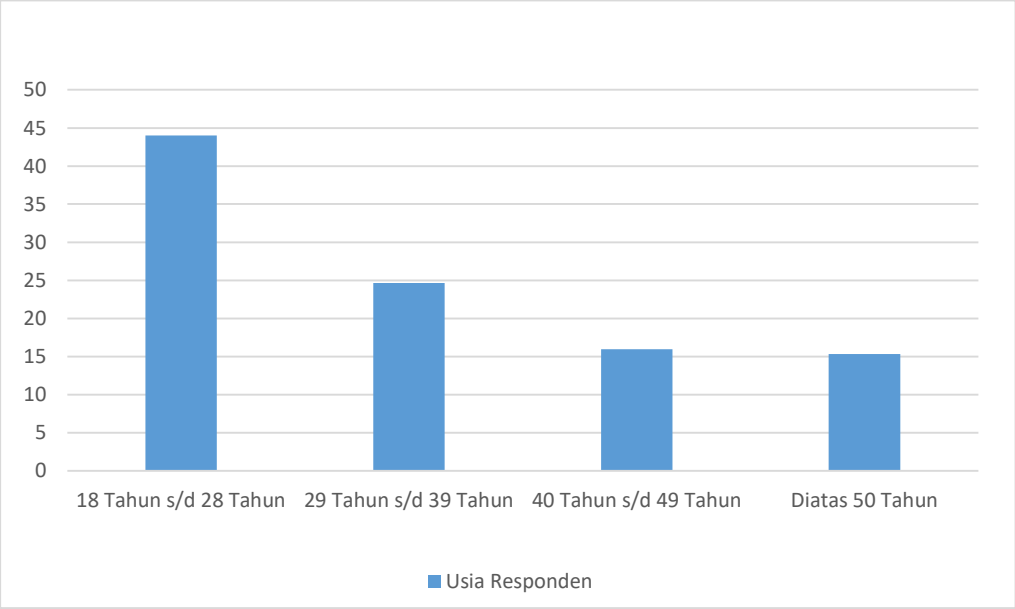

3.2. Indekspersepsikorupsi perindikator

3.2.1. Indikator ManipulasiPeraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,67

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung bersih dari korupsi.

Tabel 7.

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

		Frequency	Percent
Valid	Selalu	8	5.3333333333333%
	Sering	0	0%
	Jarang	35	23.333333333333%
	Tidak Ada	107	71.333333333333%
	TOTAL	**150**	**100%**

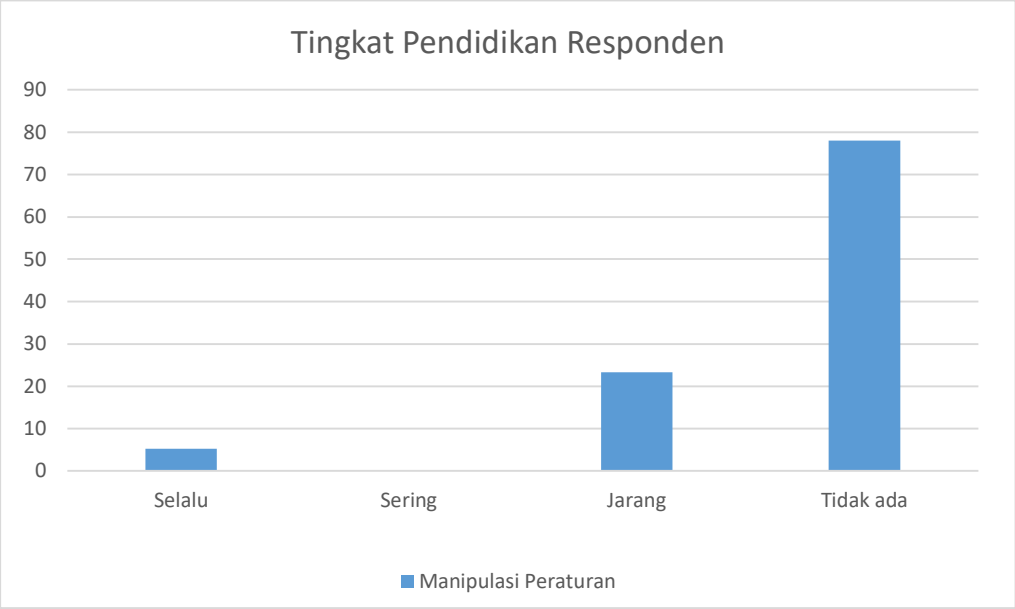

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,73

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung bersih dari korupsi.

Tabel 8.

Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

		Frequency	Percent
Valid	Selalu	2	1.3333333333333%
	Sering	6	4%
	Jarang	29	19.3333333333333%
	Tidak Ada	113	75.3333333333333%
	TOTAL	**150**	**100%**

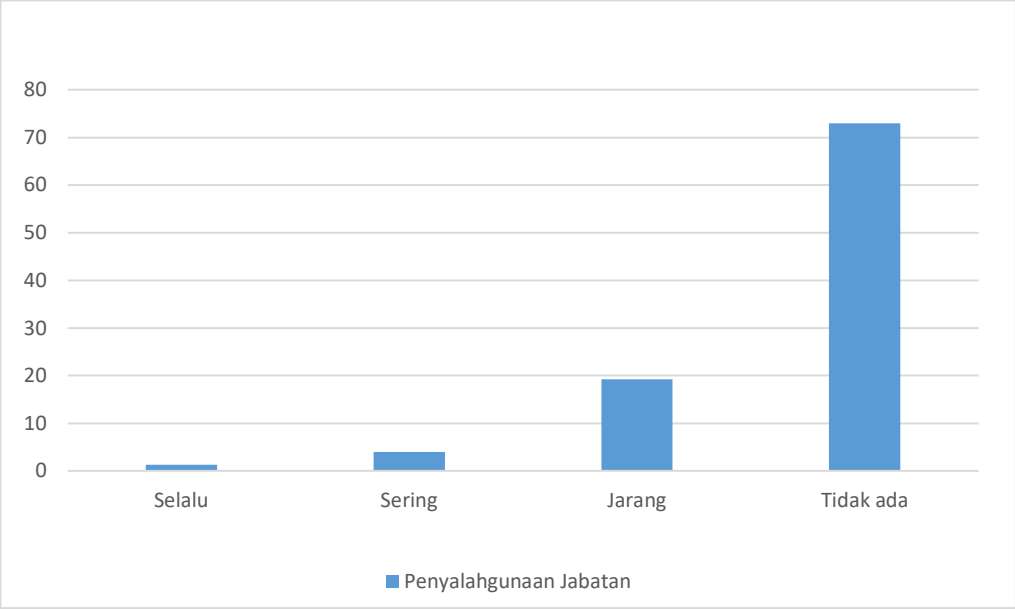

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,95

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung bersih dari korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

		Frequency	Percent
Valid	Selalu	0	0%
	Sering	0	0%
	Jarang	33	22%
	Tidak Ada	117	78%
	TOTAL	**150**	**100%**

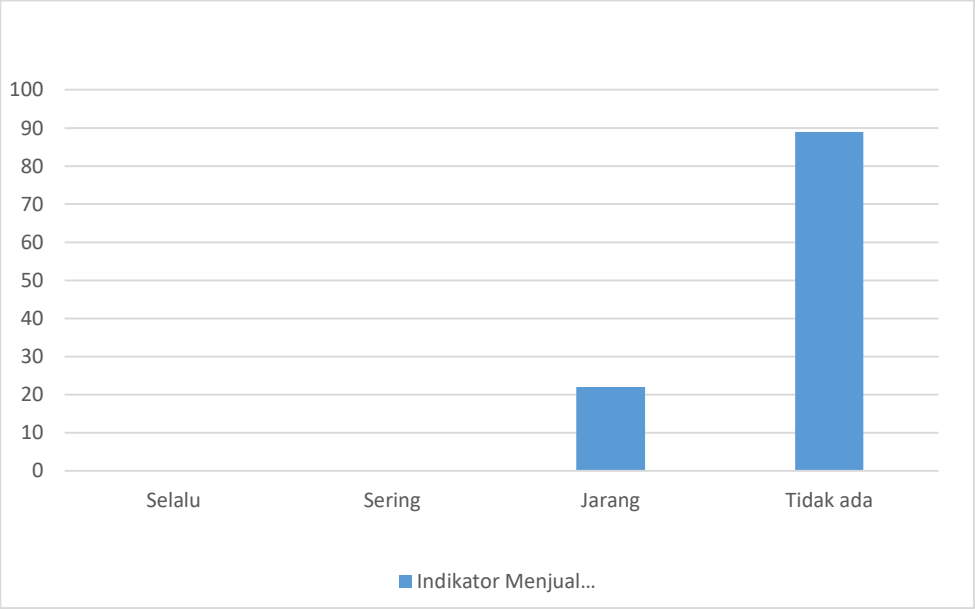

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator TransaksiBiaya ini menunjukkan hasil pada index 3,59

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung bersih dari korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

		Frequency	Percent
Valid	Selalu	8	5.3333333333333%
	Sering	2	1.3333333333333%
	Jarang	29	19.3333333333333%
	Tidak Ada	111	74%
	TOTAL	**150**	**100%**

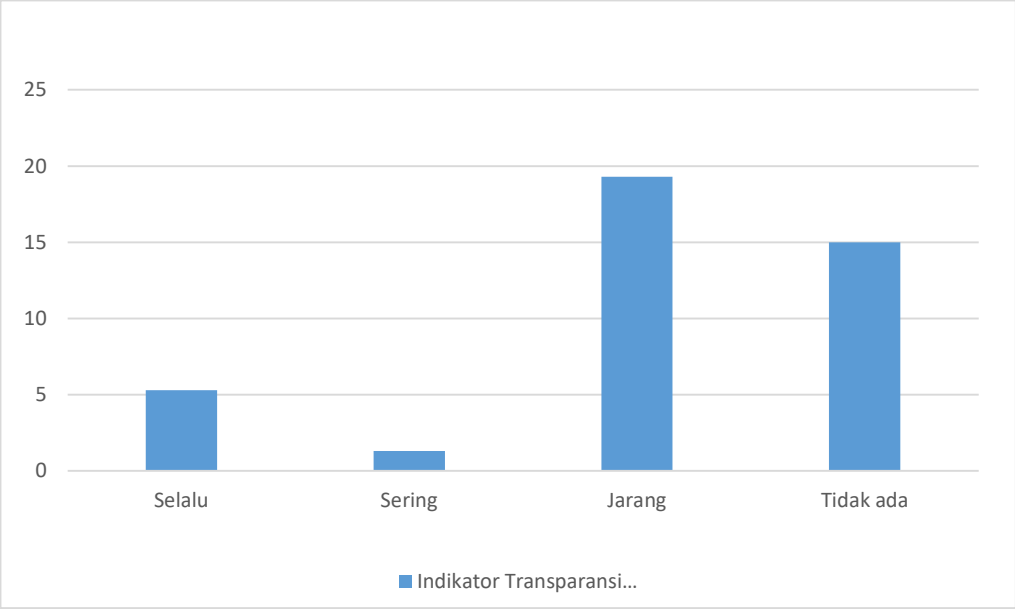

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator BiayaTambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,61

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung bersih dari korupsi.

Tabel 11.

Tabel indeks pada Indikator Biaya Tambahan

		Frequency	Percent
Valid	Selalu	11	7.3333333333333%
	Sering	1	0.66666666666667%
	Jarang	24	16%
	Tidak Ada	114	76%
	TOTAL	**150**	**100%**

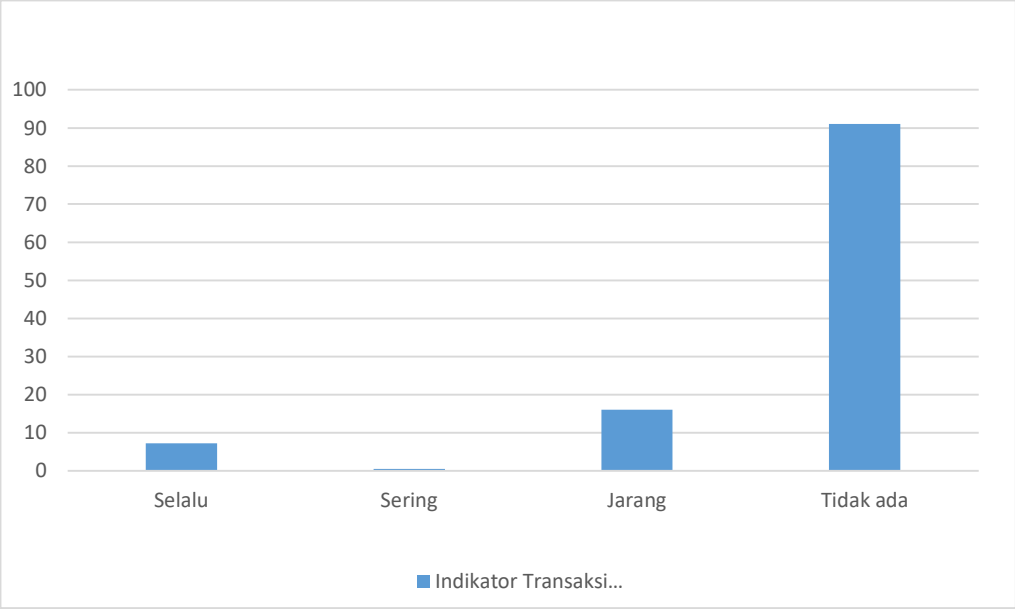

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,88

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung bersih dari korupsi.

Tabel 12.

Indeks pada IndikatorHadiah

		Frequency	Percent
Valid	Selalu	0	0%
	Sering	1	0.66666666666667%
	Jarang	33	22%
	Tidak Ada	116	77.333333333333%
	TOTAL	**150**	**100%**

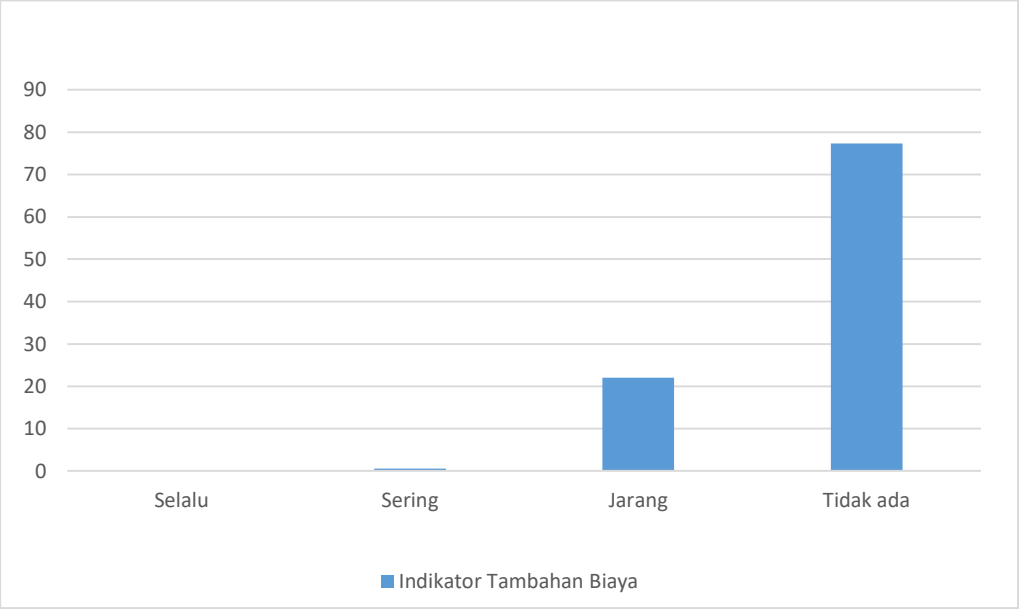

3.2.7. Indikator Transparasi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparasi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,56

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bale Bandung bersih dari korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada IndikatorTransparasiBiaya

		Frequency	Percent
Valid	Selalu	15	10%
	Sering	0	0%
	Jarang	23	15.333333333333%
	Tidak Ada	112	74.666666666667%
	TOTAL	**150**	**100%**

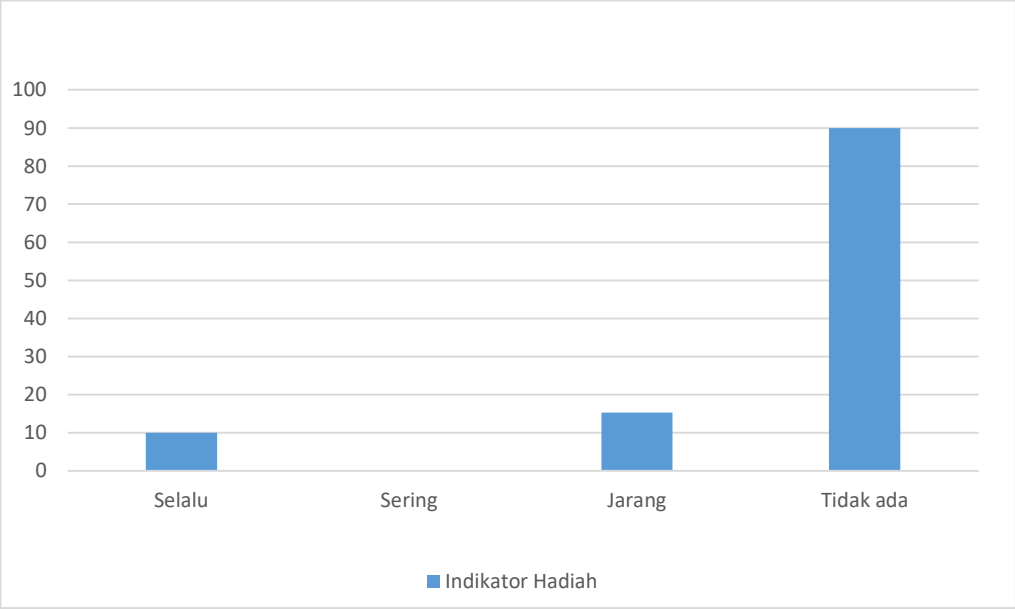

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,95

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung bersih dari korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada Indikator Percaloan

		Frequency	Percent
Valid	Selalu	0	0%
	Sering	0	0%
	Jarang	31	20.666666666 67%
	Tidak Ada	119	79.3333333333 33%
	TOTAL	**150**	**100%**

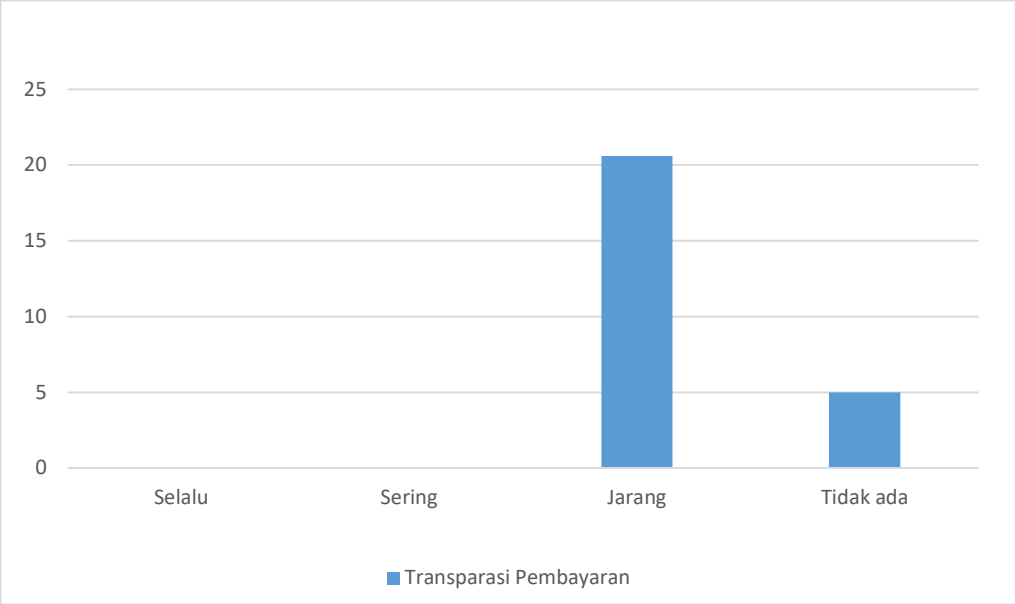

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator PerbuatanCurang ini menunjukkan hasil pada index 3,90.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung bersih dari korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada Indikator PerbuatanCurang

		Frequency	Percent
Valid	Selalu	0	0%
	Sering	0	0%
	Jarang	23	15.333333333333%
	Tidak Ada	127	84.666666666667%
	TOTAL	**150**	**100%**

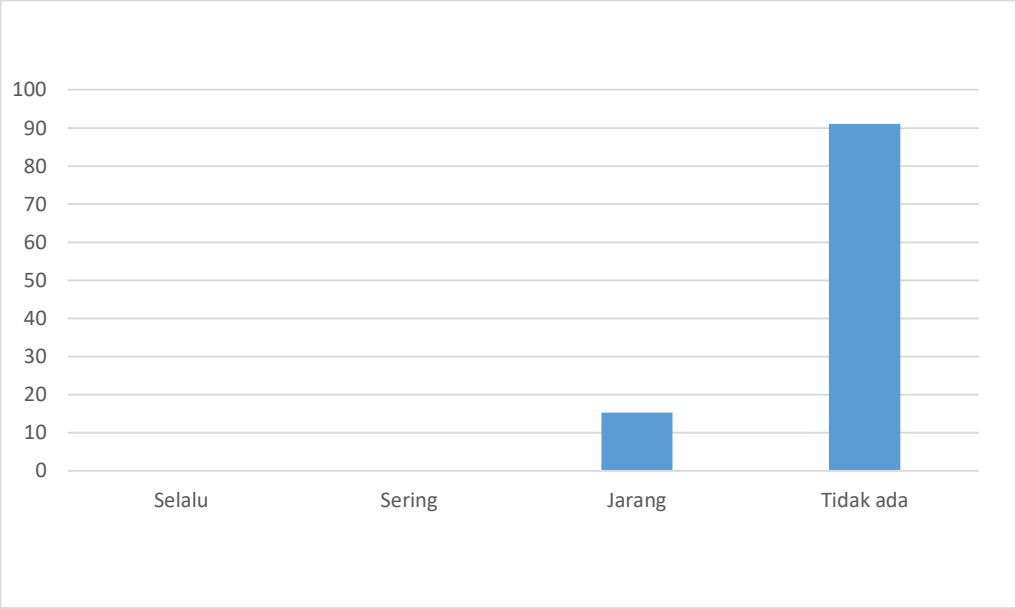

3.2.10. Indikator TransaksiRahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,97

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung bersih dari korupsi.

Tabel 16.

Indeks pada Indikator TransaksiRahasia

		Frequency	Percent
Valid	Selalu	0	0%
	Sering	0	0%
	Jarang	56	56%
	Tidak Ada	94	94%
	TOTAL	**150**	**100%**

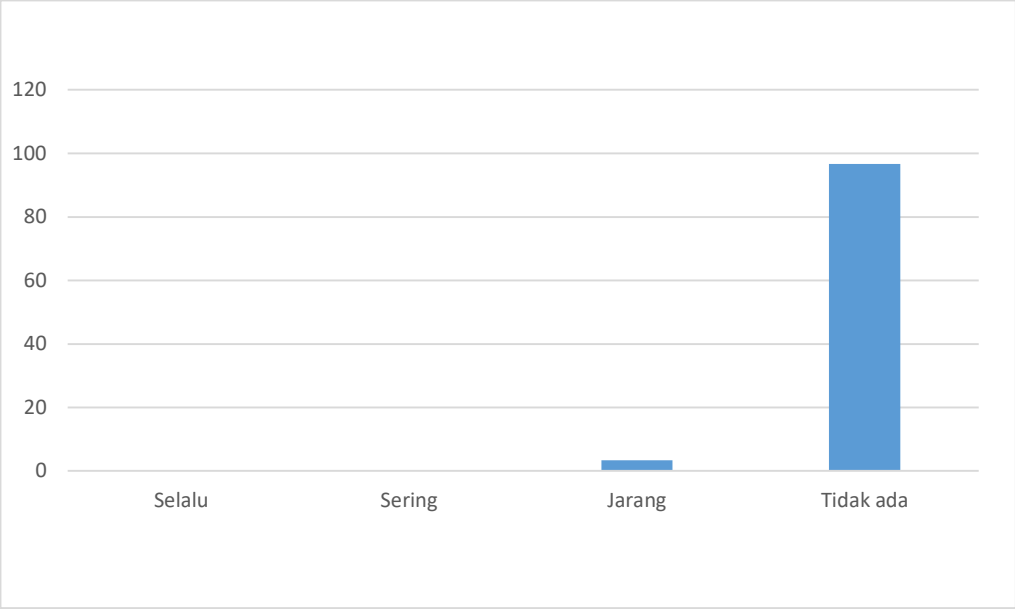

3.3. IndeksPersepsiKorupsiSatuanKerjapadapengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja PengadilanNegeri Bale Bandung sebesar 3,78.

Tabel 17.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Indekstersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di atas, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada

angka 3,732.

3.4. PersepsirespondenterhadapkualitaspelayananSatuanKerja padapengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada PengadilanNegeri Bale Bandung.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 18.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	
2	
3	
4	
5	

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja PengadilanNegeri Bale Bandung diperoleh informasi bahwa pada PengadilanNegeri Bale Bandung memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,78 **atau** masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,67
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,73
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,95
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,59
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,61
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,88
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,56
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,95
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,90
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,97

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja PengadilanNegeri Bale Bandung Semester I Tahun 2019 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,78 atau masuk pada persepsi Bersihdarikorupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator TransparansiBiaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.